

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang tidak luput dari perhatian dunia karena dilihat dari Sumber daya yang dimiliki, negara ini memiliki potensi yang cukup besar dan bukan hal yang tidak mungkin akan menjadi salah satu penguasa ekonomi Asia apabila negara ini bisa memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan optimal. Proses industrialisasi di Indonesia yang dimulai Pelita I telah mengakibatkan transformasi struktural di Indonesia. Pola pertumbuhan ekonomi secara sektoral di Indonesia agaknya sejalan dengan kecenderungan proses transformasi struktural yang terjadi di berbagai negara di dunia, dimana terjadi penurunan kontribusi sektor pertanian (sektor primer) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sementara kontribusi sektor sekunder dan tersier cenderung meningkat. Perubahan struktural mengandung arti peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri modern, yang mencakup peralihan lembaga, sikap sosial, dan motivasi yang secara radikal. Perubahan struktur semacam ini menyebabkan kesempatan kerja semakin banyak, produktifitas buruh, stok modal, dan pendayagunaan sumber-sumber baru serta perbaikan teknologi akan semakin tinggi (Jhingan,2002:87).

Struktur perekonomian wilayah yang relative maju ditandai dengan

semakin besarnya peran sektor industri dan jasa.

perekonomian wilayah tersebut. Sektor ini telah menggantikan peran sektor tradisional (pertanian) dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan wilayah. Profesor Alexander Gerschenkron dari Universitas Harvard mengemukakan 6 dalil mengenai hubungan industrialisasi dengan perekonomian suatu negara (Thee Kian Wie, 1994:), yaitu:

1. Makin terbelakang ekonomi suatu negara, makin besar kemungkinannya industrialisasi negara tersebut dimulai secara tiba-tiba sebagai suatu 'perlajuan yang pesat' (*great spurt*) yang berlangsung dengan laju pertumbuhan barang-barang jadi yang relative tinggi. (perlu ditambahkan disini bahwa konsep 'perlajuan pesat' (*great spurt*) dari Gerschenkron mirip dengan konsep lepas landas (*take off*) dari professor Rostow. Kedua konsep ini menekankan ketidaksinambungan yang khas (*specific discontinuity*) dalam proses pembangunan ekonomi, namun konsep perlajuan pesat hanya terbatas pada bidang pertambangan dan industri pengolahan, sedangkan konsep 'lepas landas' Rostow mengacu pada seluruh produksi nasional.)
2. Makin terbelakang ekonomi suatu negara, makin besar penekanan dalam industrialisasi tersebut pada pabrik dan perusahaan pada skala besar;
3. Makin terbelakang ekonomi suatu negara, makin banyak diutamakan

4. Makin terbelakang ekonomi suatu negara, makin besar tekanannya atas tingkat konsumsi penduduk negara tersebut;
5. Makin terbelakang ekonomi suatu negara, makin besar peranan yang dipegang faktor-faktor institusional untuk menambah arus modal ke industri-industri muda, dan untuk memberikan bimbingan wiraswasta (*entrepreneurial guidance*) kepada mereka yang lebih terpusat (*less de centralized*) dan dengan penerangan yang lebih baik (*better informed*); lagi pula, makin terbelakang ekonomi suatu negara, makin mencolok unsur paksaan dan makin menyeluruh faktor-faktor institusional ini,
6. Makin terbelakang ekonomi suatu negara, makin kecil kecenderungan sektor pertanian untuk memegang peranan yang aktif dalam proses industrialisasi ini berupa pasaran yang makin luas untuk barang-barang

Dalam hal ini bisa terlihat betapa pentingnya peranan industri dalam sebuah perekonomian. Karena sektor industri merupakan komponen utama pembangunan ekonomi nasional, yang tidak saja berpotensi mampu memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang besar dalam transformasi kultural bangsa ke arah yang modernisasi kehidupan masyarakat yang menunjang pembentukan daya saing nasional.

Oleh karena itu strategi pembangunan nasional diarahkan pada

seimbang, selaras dan saling menunjang. Selama masa orde baru pemerintah belum dapat mengatur daerah-daerah di tanah air berkembang dengan baik, bahkan yang terjadi adalah kesenjangan yang semakin besar dalam distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi dan kelompok yang berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan merupakan masalah di Indonesia.

Peran pemerintah daerah dalam pengembangan potensi daerah dan sektor-sektor yang menjadi andalan sangat besar. Dalam UU No. 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah dimana pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui otonomi daerah dan pengatur sumber daya nasional, yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan analisis rumusan putusan potensi ekonomi daerah, terdapat empat sektor ekonomi yang prospektif dapat dikembangkan diantaranya; sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, dan sektor pariwisata. Menggali potensi-potensi yang dimiliki daerah sangat diperlukan didalam menunjang pembangunan nasional, khususnya dalam memacu pertumbuhan ekonomi, karena keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan daerah untuk menggali potensi-potensi sumber daya yang dimilikinya serta untuk menyalurkan sumber daya tersebut ke

sendiri pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya (BPS,2000:39).

Pembangunan sektor industri pengolahan secara bertahap telah berhasil membawa perubahan dalam struktur perekonomian nasional. Disamping memberikan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berarti peningkatan pendapatan masyarakat, sektor ini juga berperan dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja. Tahun 1994 kontribusi sector industri pengolahan terhadap PDB sebesar Rp. 82.649 milyar dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.813.670 jiwa. Nilai PDB secara berkesinambungan meningkat hingga tahun 1997 menjadi Rp. 108.631,4 milyar dengan jumlah tenaga kerja yang diserap lebih banyak lagi. Tetapi pada saat terjadi krisis ekonomi awal tahun 1998, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB turun drastis menjadi Rp. 95.320,6 milyar dengan laju pertumbuhan pada titik terendah mencapai -13,01 persen. Namun kondisi tersebut mengalami perbaikan, tahun 2002 kontribusi sector industri pengolahan meningkat menjadi Rp. 113.671,7 milyar lebih tinggi dari kondisi sebelum krisis (BPS, 2002:23).

Peningkatan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB nasional tersebut tidak lain adalah hasil peningkatan dari industri pengolahan di daerah-daerah yang telah memanfaatkan sektor tersebut dengan baik. Begitu juga dengan propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadikan sektor industri

Hal ini dapat terlihat pada kinerja perekonomian Propinsi DIY selama periode 2001-2004 selalu meningkat, namun pada tahun 2005 agak melambat. Laju pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,74 persen, lebih lambat dibandingkan tahun 2004 yang mencapai 5,12 persen. Bila ditinjau dari sisi produksi, melambatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa akibat rendahnya permintaan pasar yang terpengaruh oleh naiknya BBM (BPS,2005:26).

TABEL 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha,2001-2005

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005	Rata-rata
1. Pertanian	4,10	1,75	0,44	3,55	4,35	2,84
2. Pertambangan & Penggalian	0,63	0,16	0,94	0,84	1,57	0,83
3. Industri Pengolahan	1,52	2,82	2,80	3,25	2,60	2,60
4. Listrik & Air Bersih	11,05	16,46	5,00	6,99	5,83	9,07
5. Bangunan	3,23	8,32	11,87	9,04	8,61	8,21
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	5,00	5,43	6,30	5,86	5,04	5,53
7. Pengangkutan & Komunikasi	7,68	7,06	8,16	10,10	5,76	7,75
8. Keuangan, Persewaan & Js. Prsh	4,53	7,14	7,15	6,51	8,17	6,70
9. Jasa-Jasa	4,64	3,75	2,97	2,61	2,49	3,29
PDRB	4,26	4,50	4,58	5,12	4,74	4,64

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi D. I. Yogyakarta 2001-2005, BPS.

Selain angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang perlu dicermati adalah kualitas pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang

diharapkan adalah pertumbuhan yang diikuti dengan pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Hal ini terjadi apabila pertumbuhan terjadi pada sektor-sektor kegiatan ekonomi yang padat karya (tidak padat modal), seperti sektor industri pengolahan dan pertanian.

Industrialisasi yang biasa terjadi pada beberapa wilayah yang semula berbasis pertanian tidak sepenuhnya terjadi di Propinsi D. I. Yogyakarta. Walaupun sektor industri berkembang, tapi kontribusinya yang cenderung konstan sedangkan di sisi lain kontribusi sektor perdagangan dan jasa yang selalu meningkat merupakan salah satu indikator bahwa proses industrialisasi di D. I. Yogyakarta mengalami kendala. Hal ini mungkin terkait dari kondisi wilayah D. I. Yogyakarta yang menyandang predikat kota pariwisata, kota pelajar, kota pendidikan, kota budaya, dan predikat lain yang jauh dari citra Yogyakarta sebagai kota industri, kurang menarik investor untuk menanamkan modal di sektor industri. (BPS,2005:28)

Kenaikan harga BBM dua kali selama tahun 2005 menyebabkan laju pertumbuhan sektor industri melambat. Rendahnya permintaan pasar menyebabkan produksi mengalami penurunan. Secara nominal sektor industri menghasilkan nilai tambah bruto sebesar 3,59 triliun rupiah dengan kontribusi sebesar 14,12 persen, lebih kecil dibandingkan kontribusi tahun 2004 yang sebesar 15,18 persen. Sejak tahun 2003, porsi sektor industri pengolahan terus mengalami penurunan (lihat tabel berikut)

TABEL 1.2
Distribusi Persentase PDRB Atas Harga Yang Berlaku
Menurut Lapangan Usaha 2001-2005 di Propinsi DIY

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
1. Pertanian	19,43	18,57	17,02	16,50	15,70
2. Pertambangan dan Penggalian	0,86	0,87	0,87	0,83	0,78
3. Industri Pengolahan	15,34	15,47	15,65	15,18	14,12
4. Listrik dan Air Bersih	0,86	1,04	1,18	1,22	1,27
5. Bangunan	6,82	6,96	7,40	7,92	9,13
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	19,75	19,13	19,21	18,90	19,15
7. Pengangkutan dan Komunikasi	8,75	9,63	9,71	9,72	10,19
8. Keuangan Persewaan dan Js.Prsh	8,66	9,38	9,90	9,93	9,92
9. Jasa-jasa	19,54	18,96	19,06	19,80	19,75
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi D. I. Yogyakarta 2001-2005, BPS.

Untuk mengetahui seberapa besar peranan dan pengaruh Industri pengolahan dalam perekonomian di Provinsi D. I. Yogyakarta, berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini penulis menggunakan judul **“ANALISIS PERANAN SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP PEREKONOMIAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : Pendekatan Analisis Input – Output”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut;

1. Berapa besar peran industri pengolahan terhadap perekonomian di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana keterkaitan sektor industri pengolahan dengan sektor-sektor lainnya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, baik keterkaitan ke belakang ataupun keterkaitan ke depan?

3. Berapa besar efek multiplier terhadap output, pendapatan, dan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh sektor industri pengolahan terhadap perekonomian propinsi DIY?

C. Batasan Masalah

Didalam penelitian ini perlu diberikan batasan-batasan agar dalam pengambilan langkah pemecahannya tidak menyimpang dari tujuan yang dimaksud. Adapun batasan masalahnya adalah penelitian ini dibatasi hanya di wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dipersempit lagi hanya menganalisis 28 sub sektor industri pengolahan.

D. Tujuan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya peran industri pengolahan terhadap perekonomian di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Untuk mengetahui keterkaitan sektor industri pengolahan dengan sektor-sektor lainnya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, baik keterkaitan dari sisi input maupun output?
3. Untuk mengetahui besarnya efek multiplier terhadap output, pendapatan, dan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh sektor industri pengolahan terhadap perekonomian propinsi DIY?

E. Manfaat

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Menambah wawasan tentang hal yang diteliti sehingga mampu membandingkan antara teori yang diterima di dalam perkuliahan dan praktik dilapangan serta sebagai persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Bagi Pemerintah Propinsi dan pihak-pihak terkait

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai besarnya peranan dan pengaruhnya terhadap perekonomian Propinsi dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan industri pengolahan.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi